

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 6, Juli 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8126777>

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono: Faktor Rakyat Indonesia Memilih Kembali Pada Periode Ke-2

Eyda Kurnia¹, Amalia Putri Pebryanti², Ainin Rahmadini³, Najli Safira⁴, Sri Hidayati⁵

¹²³²⁴⁵ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Jakarta, Indonesia

email: eyda.krna22@mhs.uinjkt.ac.id¹, amalia.pebryanti22@mhs.uinjkt.ac.id²,

ainin.rahmadini22@mhs.uinjkt.ac.id³, najli.safira22@mhs.uinjkt.ac.id⁴, srihidayatifsh@uinjkt.ac.id⁵

Abstract

People's expectations of positive change and progress brought by a president are only sometimes met, and a charismatic and diplomatic leader is an indicator that can bring progress to the Indonesian nation. Susilo Bambang Yudhoyono is the sixth president of Indonesia whom the Indonesian people directly elected through elections in 2004 and 2009. He is a leader who can face various problems and challenges during his tenure. SBY was always active in international cooperation and made Indonesia proud in the eyes of the world. SBY's election in the elections also became a milestone for Indonesia in becoming a more democratic country. This research aims to find out what factors are behind the Indonesian people in giving trust in SBY to serve again in the second period. This research uses a case study method with a descriptive approach to search and finds the factors of the re-election of President SBY by conducting in-depth exploration using secondary data with review materials sourced from books, articles, and scientific journals that already exist and then compiled in a research result. Based on several data and research, SBY is a charismatic leader with his leadership style that is a democratic, authentic, and aggressive style that characterizes and is unique in his leadership in his 10-year term as president of the Republic of Indonesia.

Keywords: Leadership, Susilo Bambang Yudhoyono, Factors, Democratic, Period.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang – dalam hal ini disebut pemimpin – dalam mempengaruhi dan menggerakkan pengikut secara sukarela karena dilandasi suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Seorang pemimpin perlu mengenali gaya kepemimpinannya seperti sifat, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik yang bisa diterapkan dalam kondisi organisasi yang nantinya menjadi ciri khas dari kepemimpinannya.¹ Pemimpin dalam menjalankan suatu fungsi organisasi tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga atas peran kontribusi dari pengikutnya. Kualitas dalam memberikan suatu arahan, dorongan, dan dukungan kepada pengikutnya menjadi faktor atas berhasilnya seorang pemimpin.

Soekarno, sebagai Bapak Proklamator Indonesia telah memimpin Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan, perjuangannya dalam perumusan Pancasila, perumusan UUD 1945, dan berbagai kebijakan lainnya mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka yang berdaulat. Kim Jong Un yang cukup lama dalam memimpin Korea Utara mengantarkan negara tersebut siap dengan revolusi senjata nuklir alih-alih untuk mempersiapkan perang di masa depan. Ratu Elizabeth II dalam kepemimpinannya di negara Inggris, memberikan pengaruh bukan hanya untuk negaranya tetapi seluruh negara di dunia. Dengan demikian, terlepas dari adanya pro dan kontra dalam dinamika kepemimpinan, tokoh-tokoh besar di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam periode lama memberikan perubahan besar yang berdampak pada segala bidang kehidupan di suatu negara.

Indonesia merupakan negara yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden, yang pada saat ini sudah terdapat 7 Presiden dan 9 Wakil Presiden yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan negara Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2004 silam menghantarkan terwujudnya suatu pembaharuan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saat itu dikenal dengan

¹Prasetyo Legowo, "Dua Periode Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Presiden", Jurnal Publikasi Ilmiah UMY, (2021), 2-3

nama pemilu (pemilihan umum) yang tata pelaksanaannya dilakukan secara langsung karena sistem pemilihan sebelumnya berada dalam kuasa MPR. Sistem pemilu 2004 menjadi landasan pelaksanaan pemilu di tahun-tahun selanjutnya.

Kepemimpinan SBY-Jusuf Kalla memberikan dampak yang signifikan dari periode kepresidenan sebelumnya.² Utang negara menurun, cadangan devisa mengalami peningkatan, pertumbuhan produk domestik bruto tahunan menjadi solid, meningkatnya daya beli dari masyarakat, berhasil melalui krisis global pada rentang tahun 2008-2009, menghasilkan statistik perekonomian yang stabil, dan memberikan bantuan subsidi bahan bakar kendaraan, bantuan tunai serta bantuan kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).³ Menurut Prasetyo Legowo (2021: 11) masyarakat pada saat itu bersyukur karena berada dibawah kepemimpinan SBY yang mampu untuk menuntaskan masalah perekonomian. Selain bidang ekonomi, supremasi hukum juga diberlakukan oleh SBY-Jusuf Kalla sehingga warga Indonesia memiliki kepastian dan kesamaan dalam hukum.

Berakhirnya SBY-Jusuf Kalla pada periode pertama, mengantarkan SBY maju bersama Boediono pada periode selanjutnya dan resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada periode 2009-2014. SBY-Boediono lebih memfokuskan kinerja kerja kepada pembangunan citra positif di lingkup internasional antara lain aktif dalam Sidang Umum PBB, pertemuan G-20, dan pernah juga memberikan pidato di Universitas Harvard.⁴ Namun, menurut Siska Rada (2022: 15) bahwa SBY juga turut andil dalam hubungan nasional seperti pernah turun langsung dalam aksi perdamaian Gerakan Aceh Merdeka. Dengan demikian, baik periode pertama dan kedua, prestasi-prestasi Indonesia di bawah kepemimpinan SBY mengantarkan dinamika positif untuk Indonesia di segala bidang.⁵

Masyarakat memilih SBY untuk memimpin Indonesia dalam dua periode tentu bukan tanpa sebab, menurut Dino Patti Djalal (2007) dalam bukunya menjelaskan bahwa sikap, sifat, dan cara kepemimpinan SBY adalah salah satu karakter kepemimpinan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Kekhawatiran akan sistem otoriter dan tidak kondusifnya negara akibat kepemimpinan dalam periode yang sangat lama seperti pada masa Soekarno dan Soeharto mengantarkan Indonesia ke dalam amandemen pasal 7 UUD 1945.⁶ Presiden dan Wakil Presiden hanya diperbolehkan untuk dua kali periode masa jabatan sehingga memberikan kenyataan masyarakat Indonesia untuk tidak dapat memilih kembali SBY untuk menjadi Presiden pada periode selanjutnya.

Persoalan mengenai kesuksesan SBY dalam kepemimpinannya pernah diteliti oleh (Nadia Khoirun Nisa: 2022) dengan judul “Menegal Gaya Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono”. Nadia dalam penelitiannya mengemukakan biografi SBY mengantarkan keberhasilan dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai di Indonesia yakni kepemimpinan demokratis, kharismatik, dan moralis. Aksi yang dilakukan SBY memiliki peran penting dalam perkembangan nasional dan hubungan kerjasama internasional yang tentunya menjadi perubahan positif, tetapi tentu kebijakan yang diterapkan tidak terlepas dari kontra yang menghasilkan kekurangan sehingga menjadikan model kepemimpinan SBY seakan tidak akan efektif apabila diterapkan dalam periode yang lebih lama.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Prasetyo Legowo: 2021) dengan judul “Dua Periode Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden”. Biografi dan model kepemimpinan SBY kembali menarik perhatian sehingga pada penelitian ini memberikan fakta bahwa Indonesia mendapatkan kembali puncak kejayaannya dengan mampu memberantas berbagai krisis yang merupakan hasil kebijakan pada periode sebelumnya. Prasetyo juga menegaskan bahwa di akhir periodenya, sayangnya SBY memberikan traumatik kepada masyarakat karena terlalu fokus pada hubungan internasional sehingga lemahnya peraturan di dalam negeri.

² Prasetyo Legowo, “Dua Periode Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Presiden”, Jurnal Publikasi Ilmiah UMY, (2021), 7-9

³ Jodi Rizky Kusuma, “Analisis Perbandingan PDB, Konsumsi, Investasi, Ekspor Neto di Indonesia Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Era Presiden Joko Widodo”, Ekuitas : Jurnal Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 8, no. 2, (2020) 155

⁴ Aji Widiatmaja dan Ulul Albab, “Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional”, Jurnal Politika 10, no. 1 (2019), 89-91

⁵ Siska Rada Rahma, “Dua Periode Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Presiden”, Jurnal Publikasi Ilmiah UMY, (2022), 6-7

⁶ Prasetyo Legowo, “Dua Periode Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Presiden”, Jurnal Publikasi Ilmiah UMY, (2021), 4

Pada penelitian sebelumnya disebutkan bahwa periode kepemimpinan SBY mengantarkan perubahan besar yang positif terhadap Indonesia. Penelitian sebelumnya juga memberikan fakta bahwa di akhir periode kedua dalam kepemimpinannya, SBY melunturkan rasa kepercayaan masyarakat karena lebih mengutamakan hubungan Internasional. Oleh karena itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada faktor yang membuat masyarakat memilih kembali SBY menjadi presiden pada periode tahun 2009-2014. Penelitian ini tidak berfokus kepada kekurangan dari hasil kebijakan semasa kepemimpinan SBY, tetapi lebih membahas tentang bagaimana gaya kepemimpinan SBY.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dengan bahan telaah yang bersumber dari buku, artikel, serta jurnal ilmiah yang sudah ada. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan deskriptif yang mendeskripsikan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang selanjutnya diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemilihan Langsung dan Pengaturan Pemaksimalan Periode Kepresidenan

Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dipilih berdasarkan inisiasi dari PPKI. Kedua pemimpin tersebut bahkan ditetapkan sebagai pemimpin seumur hidup sesuai Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 karena kepemimpinan Soekarno-Hatta memberikan dampak yang signifikan terhadap Indonesia dari sebelum dan selama kemerdekaan RI dari memang PPKI sendiri tidak memberikan batasan waktu akan penetapan kekuasaan Presiden tersebut.⁷ Hingga pada 1967, terbitlah Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai Presiden selanjutnya. Terpilihnya Soeharto terlihat dari dominasi partai Golongan Karya dan ABRI pada sidang paripurna MPRS. Oleh karena itu, pemberian kekuasaan Presiden kepada Soeharto dari Soekarno diibaratkan dengan penggulingan kekuasaan karena mekanismenya tidak menganut pada prinsip dari UUD 1945 yakni terdapat dalam peristiwa Nawaksara di mana Soekarno ditolak dalam berpidato di sana.⁸

Berbeda dengan Soekarno, kepemimpinan Soeharto berhenti karena pengunduran dirinya pada tanggal 29 Mei 1999, yang selanjutnya menyerahkan jabatan Presiden kepada BJ. Habibie yang menjadi Wakilnya. Pengunduran Soeharto didasari oleh gencatan semangat masyarakat akan harus berakhirnya masa orde baru dan menyambut masa reformasi salah satunya demonstrasi dari mahasiswa di Indonesia. Kendati demikian, sesuai pada pasal 8 UUD 1945 bahwa Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.⁹ Namun, masa jabatan BJ Habibie dipercepat karena hasil dari forum Sidang Umum MPR sehingga berakhir pada tahun 1999 yang seharusnya di tahun 2003. Pemilu 1999 memberikan kesempatan kepada Abdurrahman Wahid – akrab disebut Gus Dur – sebagai Presiden RI dengan wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Kepemimpinan Gus Dur akhirnya diberhentikan sesuai dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 karena melakukan pelanggaran terhadap haluan negara baik dalam menjalani tugasnya sebagai Presiden, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan MPR maupun perundang-undangan lainnya. Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-5 sekaligus menjadi Presiden Perempuan Pertama dalam sejarah Indonesia yang pengangkatannya didasari pada Ketetapan MPR No. III/MPR/2001. Pada 2004 berakhirnya masa kepemimpinan Megawati, maka dilakukan pemilihan langsung pertama di Indonesia yang memberikan suara banyak kepada Susilo Bambang Yudhoyono setelah putaran kedua dan mengalahkan Megawati Soekarnoputri.

⁷ Sunarno, "Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa ke Masa." Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Unsri 9 no.2 (2011): 77-83

⁸ Hayatun Na'imah, "Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia." Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 13 no.1 (2015): 120-137

⁹ Sunarno, Loc.Cit.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tiap pemilihan dan peralihan kekuasaan Presiden RI memiliki kekhasannya tersendiri. Kendati demikian, proses SBY menjadi Presiden selama dua periode juga memberikan sejarah kepemimpinan di Indonesia. Terpilihnya SBY menjadi Presiden RI periode 2004-2009 melalui penyelenggaraan pemilu 2004 yang di mana menurut partai politik dan fraksi-fraksinya di DPR masih memiliki beberapa kelemahan mendasar yang perlu diperbaiki. Penguasaan partai politik yang masih sentral menyebabkan dorongan untuk memperbaiki sistem pemilu melalui perubahan UU No. 12 tahun 2003 menjadi UU No. 22 Tahun 2007.¹⁰ Hal ini juga pernah dialami oleh Indonesia pada masa ditetapkannya Soeharto menjadi Presiden bahwa terdapat suatu kekuasaan partai politik. Dalam perjalanan diskursus tentang pemilu, isu tentang pilihan sistem proporsional terus bergulir sehingga ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2003 menghasilkan norma bahwa sistem pemilu yang digunakan adalah “sistem proporsional dengan daftar calon terbuka”. Electoral formula atau formula pemilihan yang lebih praktis dimaknai sebagai metode penghitungan perolehan kursi untuk setiap parpol.¹¹ Data utama yang digunakan adalah perbandingan antara hasil perolehan suara yang diperoleh setiap parpol peserta pemilu dengan perolehan kursi di DPR dari parpol peserta pemilu tersebut. Jika melihat data, maka akan tampak hasil perolehan suara tidak selalu sebanding dengan hasil perolehan kursi.

Perkembangan politik pasca orde baru turut beriringan dengan wacana perubahan UUD 1945 bahkan sebagian menghendaki perubahan secara keseluruhan dengan membentuk sistem konstitusi yang baru. UUD yang hakikatnya merupakan konstitusi tertinggi malah dipandang sebagai suatu yang singkat karena masalah-masalah lebih banyak diserahkan kepada peraturan yang lebih rendah sehingga tidak menjamin tentang hak-hak asasi manusia (HAM).¹² Ketidakseimbangan dalam tata kehidupan yang dianggap tidak lagi sejalan dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia menjadikan sebagian kelompok selalu mengupayakan perubahan konstitusi sebagai pengganti UUD 1945. Perumusan undang-undang yang diupayakan lebih sesuai dengan kondisi Indonesia telah dilakukan sebanyak empat kali amandemen dalam Sidang Umum MPR sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Amandemen tahun 1999 adalah konsensus refleksi dari kepemimpinan Soekarno dan Soeharto yang terlalu kuat (*executive heavy*), maka dengan ini mengantarkan perubahan pada Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 di mana memuat tentang ketentuan mengurangi, membatasi, serta mengendalikan kekuasaan presiden.

Terkait dengan kejayaan Indonesia yang dilakukan pada pemerintahan SBY, tidak heran apabila masyarakat menginginkannya kembali pada masa periode pemilu 2009. Beberapa pengamat dan ahli pemilu di Indonesia menyatakan bahwa Pemilu 2009 diibaratkan sebagai proses konsolidasi demokrasi, sehingga Pemilu 2009 dapat disebut sebagai pemilu untuk mewujudkan “demokrasi substansial” guna mempercepat terbentuknya “demokrasi yang terkonsolidasi”.¹³ Bersamaan dengan itu, setelah kepemimpinannya pada periode kedua, SBY tidak dapat lagi dicalonkan dan dipilih menjadi Presiden karena adanya batasan yang mengatur masa jabatan presiden. Sebelum amandemen, Pasal 7 UUD 1945 berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Namun, setelah dilakukannya Sidang Umum MPR 1999 pada 14-21 Oktober 1999 maka bunyi Pasal 7 UUD 1945 mengalami perubahan yakni "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Hal ini bisa dikatakan suatu harapan dalam politik di Indonesia yang pada akhirnya tercapai keutuhan makna kepemimpinan Presiden yang harus dihargai dan dipatuhi, terlebih jika merefleksikan dari kasus-kasus pemilihan dan pemberhentian atau pengunduran Presiden-Presiden RI sebelumnya. Perubahan pengaturan tersebut termaknai bahwa negara memiliki semangat dalam membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan sistem negara tidak otoriter atau sewenang-wenang.

Pembaharuan Di Indonesia Ketika Periode Pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakil presiden di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 2004-2009, pemerintah melakukan berbagai upaya pembaharuan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi,

¹⁰ Indra Pahlevi, “Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia”, *Jurnal Politika* 5 no.2 (2014): 123-132

¹¹ *Ibid.*, 127

¹² Hafid Nafi Maula, “Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Presidensial di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”, Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2018): 70

¹³ Pahlevi, *Loc.Cit.*

pendidikan, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintahan SBY pada periode pertamanya.

Di sektor politik, pada 21 Oktober 2004, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu I yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakil presiden Muhammad Jusuf Kalla. Pada 5 Desember 2005, presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menteri, presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.¹⁴

Salah satu program utama pemerintahan SBY-JK adalah Program 100 Hari yang bertujuan mewujudkan keadilan dan demokrasi, sekaligus memperbaiki sistem ekonomi yang memberatkan rakyat Indonesia. Melalui kepolisian dan kejaksaan agung, program ini berhasil memeriksa pejabat yang diduga korupsi. Presiden memberikan KPK kebebasan 100 hari untuk menyelidiki dan memberantas korupsi di antara 31 pejabat pemerintahan. Langkah ini disambut baik oleh masyarakat. Hal-hal baik tercapai selama pemerintahan SBY, terutama di bidang ekonomi. Jumlah hutang luar negeri Indonesia menurun, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunannya terbukti solid. Indonesia berhasil bertahan dari krisis global tahun 2008-2009 tanpa masalah yang berarti berkat peningkatan komoditas pada tahun 2000-an dan peningkatan daya beli yang cepat.¹⁵ Keunggulan ekonomi lainnya adalah konsumsi masyarakat yang sangat tinggi, investasi menunjukkan peningkatan yang baik, dan ekspor neto yang kuat, menjadikan perekonomian semakin stabil.¹⁶ Jika dibandingkan, kinerja pemerintahan SBY selama 5 tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5% secara rata-rata dari tahun 2005-2009 (BPS:2010). Sementara itu, pada masa awal pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 4,79%. Namun, setelah 4 tahun pemerintahan, perekonomian mulai menunjukkan tren pertumbuhan yang terus meningkat, sehingga pada akhir masa jabatannya di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi secara rata-rata mencapai 5,02% (BPS:2020).

Pada masa pemerintahan SBY-JK, perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 menjadi salah satu fokus utama mengungkapkan target-target perekonomian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. RPJMN ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia dan mencakup tiga agenda nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, serta menjamin keamanan dan kedamaian. Implementasi RPJMN ini menjadi penting karena merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden sebagaimana yang telah di kampanyekan selama proses pemilihan presiden.¹⁷

Pada sektor pendidikan, pemerintahan SBY menetapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan merealisasikan amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Program wajib belajar 12 tahun dan peningkatan mutu pendidikan adalah beberapa program yang diluncurkan. Selain itu, SBY juga meluncurkan program beasiswa untuk siswa-siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membantu sekolah dengan dukungan keuangan sehingga mereka dapat membebaskan biaya siswa sambil tetap memberikan layanan pendidikan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Program sertifikasi pendidik juga diterapkan untuk meningkatkan standar guru di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru serta standar pendidikan di Indonesia. Selain itu, ada bantuan dan tunjangan untuk siswa dan operasional pendidikan seperti bantuan beasiswa untuk siswa miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Dengan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan pendidikan Indonesia semakin maju dan berkualitas tinggi.¹⁸

¹⁴ Melkisedek Bagas F, Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Kabupaten Simeulue: PT. Maraga Borneo Tarigas, 2019), 7.

¹⁵ Laksa, "Era Kepresidenan SBY Periode Pertama (2004-2009)", diakses pada 29 April 2023 dari <https://www.abdinagarnews.web.id/2019/11/era-kepresidenan-sby-periode-pertama.html>

¹⁶ Jodi Rizky Kusuma, "Analisis Perbandingan PDB, Konsumsi, Investasi, Ekspor Neto di Indonesia Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Era Presiden Joko Widodo." *Ekuitas : Jurnal Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* 8 no.2 (2020): 155. 2

¹⁷ Bagas F, Op.Cit. 9

¹⁸ Saprudin Padlil Syah, Kebijakan Pendidikan Strategis Era SBY, diakses pada 29 April 2023, sumber; <https://www.kompasiana.com/padlilisyah/54f39506745513a32b6c7a5b/kebijakan-pendidikan-strategis-era-sby>

Di sektor lingkungan, pemerintahan SBY meluncurkan program penanaman seribu pohon sebagai upaya memperbaiki kualitas udara dan mengurangi polusi di perkotaan. Program ini membuka kegiatan penanaman seratus juta pohon secara serentak di seluruh Indonesia. Tanggal 28 November ditetapkan sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia dan Desember sebagai bulan Menanam Nasional. Selain itu, SBY juga mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).¹⁹

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga melaksanakan berbagai perubahan untuk mewujudkan prinsip demokrasi dengan kebebasan pers yang berkembang pesat pada periode kepemimpinannya. Berbagai media massa bebas mengkritik pemerintah secara terbuka sebagai upaya mewujudkan good governance. Meskipun mengalami kemajuan, masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga diwarnai dengan peristiwa penting seperti bencana alam, kasus-kasus korupsi serta konflik antara lembaga polri dan KPK.²⁰

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada periode pertama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakil presiden di Indonesia, banyak upaya pembaharuan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Beberapa bidang yang mengalami pembaharuan antara lain politik, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Di sektor politik, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu I dan melakukan perombakan kabinet dua kali. Program 100 hari dikenal sebagai program pertama pemerintahan SBY-JK. Pada sektor ekonomi, Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di bidang ekspor neto, investasi, dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan. Pada sektor pendidikan, SBY meluncurkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti program wajib belajar 12 tahun dan program peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, program beasiswa dan sertifikasi pendidik juga diluncurkan untuk meningkatkan standar guru Indonesia. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintahan SBY-JK berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, serta menjamin keamanan dan kedamaian.

Pembaharuan Di Indonesia Ketika Periode Kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Kepemimpinan merupakan kekuatan yang telah dimiliki seseorang agar dapat memberikan pengaruh untuk orang lain dan tidak memaksakan kehendak untuk memberi motivasi suatu pihak dalam rangka tujuan tertentu. Selain itu, kepemimpinan dari seseorang yang memimpin bertujuan memberikan arahan terhadap bawahannya, hal lainnya merupakan suatu motivasi ataupun faktor pendorong agar bisa bekerja sama dengan produktif dan dapat menggapai tujuan yang sudah ditentukan.²¹

Sosok pemimpin harus mempunyai tanggung jawab terhadap hal yang sudah menjadi tugasnya dan wajib bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pertanggungjawaban yang telah dilakukan pemimpin sepenuhnya atas segala hal yang ia lakukan untuk suatu kelompok, organisasi, atau negara. Baik keberhasilan ataupun kegagalan itu sendiri bergantung kepada seseorang pemimpin.²²

Dewasa ini Indonesia memiliki pembatasan masa jabatan presiden yang bertujuan agar tercegah dari penguasaan jabatan yang dilakukan terus-menerus yang nantinya dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, maka dari itu perubahan pada UUD 1945 pasal 7 yang mulanya berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali", mendapat perubahan menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Dengan itu Presiden yang ada di Indonesia hanya bisa memegang jabatan selama 2 periode

¹⁹ Kompas.com, SBY Akan Tanam 1.000 Pohon, diakses pada 29 April 2023, sumber; <https://nasional.kompas.com/read/2008/11/11/14444326/SBY.Akan.Tanam.1.000.Pohon>

²⁰ Bagas F, Op.Cit. 5

²¹ Yohanis Salutondok dan Agus Supandi Soegoto, 2015, Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Kondisi Kerja dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Dikantor Sekretariat DPRD Kota Sorong, Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister Manajemen Universitas Sam Ratulangi, Vol. 3, No. 3, Hlm. 850, Manado, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9659>

²² Olivia Jap, 2014, Taktik Self Presentation Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Melalui Akun Twitter, Jurnal E-Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, Vol. 1, No. 1, Surabaya, <https://media.neliti.com/media/publications/83372-ID-none.pdf>

yang berbeda.²³

Dari ketentuan tersebut Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden ke-6 yang menjabat sebagai presiden selama 2 periode, periode pertama dimulai 20 Oktober 2004 sampai ... Oktober 2009 dan periode kedua ... Juli 2009 sampai 20 Oktober 2014. Beliau dapat menjadi seorang presiden setelah diadakannya Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dilakukan secara langsung tahun 2004. Beliau juga membangun Partai Demokrat yang digunakannya sebagai sebuah kendaraan politik yang berhasil mengantarkannya menjadi seorang presiden setelah melalui dua tahapan pemilihan.²⁴

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin di periode kedua pada tahun 2009 hingga 2014, beliau memilih Budiyono sebagai pendampingnya yang menjabat di Wakil Presiden. Konsep yang disebut Trias Politica (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) di masa pemerintahan SBY mengalami sebuah rekonstruksi, yang dimana konsep ini memiliki tujuan sebagai penempatan posisi yang berdasar pada prinsip struktural sistem politik yang ada di Indonesia, yaitu berlandaskan kedaulatan pada rakyat.²⁵

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kebijakan luar negeri yang ia keluarkan yaitu pro aktif dan high profile. Hal tersebut direalisasikan dengan cara safari politik internasional yang bertujuan menaikkan citra positif bangsa Indonesia sendiri dimata internasional. SBY memiliki harapan untuk memperlihatkan bahwa posisi Indonesia ini lumayan penting dimata dunia, dengan jargon "thousand friends zero enemy".²⁶ SBY sendiri memulai kejasamanya dengan berhubungan dengan negara-negara ASEAN dan negara sekitar yang dijadikan sebagai concentric circle yang memiliki fungsi corner stone politik luar negeri bangsa Indonesia. SBY juga memiliki peran dalam aspek perpolitikan internasional, dimulai dengan penawaran New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) di acara Konferensi Asia-Afrika yang ke-50.

Dimasa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah banyak pembangunan diplomasi secara internasional yang dilakukannya. Dengan strategic partnership atau comprehensive partnership Indonesia memiliki tujuan untuk merangkai struktur sebuah hubungan untuk mencapai target yang sudah ditentukan secara bersama. Indonesia yang berprinsip thousand friends zero enemy ini bertujuan menaikkan rasa kepercayaan di kancah internasional agar bisa membangun hubungan yang konstruktif.²⁷

Masyarakat Indonesia menganggap pemerintah yang dinaungi oleh kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini cukup serius untuk mengerjakan permasalahan ekonomi yang memiliki dampak pada peningkatan pendapatan bangsa Indonesia.²⁸ Selama kepemimpinan SBY ini, pertumbuhan perekonomian Indonesia melaju sampai 5-6%. Pencapaian yang paling tinggi 6,5% ditahun 2011 dan paling rendah 4,5% ditahun 2009, hal ini dikarenakan adanya sebuah tekanan perekonomian global yang berefek kelemahan rupiah, puncaknya di tahun 2008 kasus krisis perekonomian ini.²⁹

Dimasa ini SBY juga melakukan pemberantasan korupsi tapi hal ini tidak terlepas dari kalangan yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Walau sudah melakukan kebijakan pemberantasan ini, namun masih ada kekurangannya di aspek implementasi. Di periode ini terdapat beberapa

²³ Elsan Yudhistira, 2020, Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 23, No. 2, Hlm. 149, Jakarta, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/43/37/undefined>

²⁴ Garda Maeswara, *Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), Hlm. 42-43, <https://books.google.co.id/books?id=95GufseF-6wC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

²⁵ Prasetyo Legowo, *Dua Periode Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Presiden*, Research Gate, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm. 8

²⁶ Prasetyo Legowo, *Dua Periode Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Presiden*, Research Gate, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm. 9

²⁷ Aji Widiatmaja dan Ulul Albab, 2019, Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional, *Politica, Program Studi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia*, Vol. 10, No. 1, Jawa Barat, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1313>

²⁸ Laska, "Era Kepresidenan SBY Periode Kedua (2009-2014)", diakses dari <https://www.abdinegaraneews.web.id/2019/11/era-kepresidenan-sby-periode-pertama.html> pada hari Senin, 23 April 2023, pukul 20:56 WIB

²⁹ Kumparan, 2019, *Membandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi*, diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/membandingkan-pertumbuhan-ekonomi-era-sby-dan-jokowi-1549415979213066574/full>, pada hari Kamis, 26 April 2023, pukul 13:05 WIB

permasalahan, yakni tidak adanya transparansi pemerintahan terhadap khalayak umum, ketidakpastian suatu sistem hukum, pemerantasan kegiatan KKN, dan suatu reformasi birokrasi yang tidak ada titik terangnya.³⁰

Perbandingan Antara Periode

Periode 1

Antara Februari 2005-Maret 2006, Garis Kemiskinan meningkat sebesar 18,39%, dari Rp129.108,- per kapita per bulan pada Februari 2005 menjadi Rp152.847,- per kapita per bulan pada Maret 2006. Dalam Garis Kemiskinan (GK), komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki peran yang lebih besar daripada komponen Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM) (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Februari 2005, kontribusi Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 70,54%, namun meningkat menjadi 74,99% pada bulan Maret 2006. Kenaikan peranan GKM ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tercermin dalam inflasi umum sebesar 17,95% selama periode Februari 2005-Maret 2006 (Badan Pusat Statistik, 2006). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan SBY (2005-2007) relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi selama masa Soeharto yang mencapai sekitar 7% selama 32 tahun, dengan puncak tertinggi pada tahun 1980 yaitu 9,9%.³¹

Periode 2

Tahun 2009 nilai perdagangan Indonesia-China mencapai US\$ 22,5 milyar, tahun 2010 menjadi US\$ 42,5 milyar, dan tahun 2011 meningkat lagi menjadi US\$ 60,5 milyar. Pada tahun 2012 dalam bidang ekonomi, volume perdagangan antara Indonesia dan China tercatat US\$ 66,6 milyar atau lebih tinggi 9,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan segi bisnis dan perdagangan, bagi China, Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat strategis. Dengan kepemilikan atas sembilan dari sepuluh pelabuhan terbesar di dunia, dan jalur-jalur laut paling sibuk yang dapat menghasilkan lebih dari US\$ 8 triliun dari arus perdagangan dua arah.³²

Di Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masyarakat Indonesia menganggap pemerintah yang dinaungi oleh SBY ini cukup serius untuk mengerjakan permasalahan ekonomi yang memiliki dampak pada peningkatan pendapatan bangsa Indonesia.³³ Selama kepemimpinan SBY ini, pertumbuhan perekonomian Indonesia melaju sampai 5-6%. Pencapaian yang paling tinggi 6,5% tahun 2011 dan paling rendah 4,5% di tahun 2009, hal ini dikarenakan adanya sebuah tekanan perekonomian global yang berefek pelemahan rupiah, puncaknya di tahun 2008 kasus krisis perekonomian ini.³⁴

Dampak yang ditimbulkan di tiap periode

Jika dilihat dari data di tiap periode dapat dikatakan antara periode 1 dengan periode 2 tingkat pertumbuhan perekonomian yang ada berada di bawah naungan SBY ini relatif lebih baik dan cukup meningkat. Dengan adanya hubungan bilateral dagang antara Indonesia dengan China ini menjadi faktor meningkatnya sektor perekonomian yang ada di Indonesia sendiri. SBY memang memfokuskan

³⁰ Irmaline Pakazeni F. dan Cindy Nabila, 2020, Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia Pada Demokrasi di Era SBY dan Jokowi, *The Journalish: Social and Government*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri, Vol. 1, No. 3, Hlm. 106, Palembang, <https://core.ac.uk/download/pdf/335018684.pdf>

³¹ Abdul Hakim & Guswildan Giovani, 2012, Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945 - 2009), *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Vol. 03 No.2, Hlm. 173-177

³² Estyningtias (Lajnah Siyasiah DPP MHTI). 2013. "Imperialisme AS di Balik Topeng APEC – dikutip dari pernyataan Laksamana Samuel J. Locklear III (Panglima Komando Militer AS di Kawasan Pasifik)", dalam <http://hizbuttahir.or.id/2013/10/13/imperialisme-as-di-baliktopeng-apec/>, diakses pada 21 Mei 2023

³³ Laska, "Era Kepresidenan SBY Periode Kedua (2009-2014)", diakses dari <https://www.abdinegaraneews.web.id/2019/11/era-kepresidenan-sby-periode-pertama.html> pada hari Senin, 23 April 2023, pukul 20:56 WIB

³⁴ Kumparan, 2019, Membandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi, diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/membandingkan-pertumbuhan-ekonomi-era-sby-dan-jokowi-1549415979213066574/full>, pada hari Kamis, 26 April 2023, pukul 13:05 WIB

sektor perekonomian karena ingin meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Terlihat dari kebijakan yang terfokuskan kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi BBM yang bertujuan agar terjaganya stabilitas perekonomian makro.³⁵ Terbukti di masa kepemimpinan SBY ini perekonomian Indonesia cukup stabil dan laju inflasi bisa dikendalikan. Selain itu, permintaan pasar domestik juga mengalami pertumbuhan yang meningkat dan terjadinya penurunan barang-barang impor. Namun, dibalik keberhasilan yang dicapai selama 2 periode ini SBY memiliki kelemahan, yaitu jumlah pengangguran yang meningkat dan penyebaran distribusi pendapatan yang timpang.

Gaya Kepemimpinan Periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Dalam menjalani suatu sistem pemerintahan Indonesia, diperlukan sosok pemimpin yang dapat mengendalikan, menggerakkan, serta mempengaruhi orang lain ataupun sekelompok individu agar dapat mencapai suatu tujuan negara Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, tiap-tiap pemimpin mempunyai pola perilaku dan strategi yang ia sukai dan sering ia terapkan dalam periode masa kepemimpinannya. Pada analisa yang dilakukan oleh (Hasan Supriadi : 2018) dengan judul "Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia" Hasan menyatakan bahwa sejarah perjalanan lembaga kepresidenan Indonesia memiliki keunikan tersendiri, sebagaimana tiap-tiap bangsa memiliki ciri khas pada sejarah pemimpin mereka masing-masing.³⁶ Serta dijelaskan bahwa kepemimpinan presiden Indonesia yang bermula dari Ir. Soekarno hingga saat ini, yaitu masa kepemimpinan Joko Widodo, memiliki pola dan gaya kepemimpinan yang berbeda walaupun mereka sama-sama memiliki tujuan untuk memerintah negara Indonesia.

Pada masa periode kepemimpinan SBY, ia dikenal sebagai sosok kharismatik yang merupakan lulusan terbaik AKABRI. ia memiliki ciri khas serta gaya yang berbeda dari kelima presiden sebelumnya, terutama dalam gaya kepemimpinan militeristik yang ia terapkan. Dalam beberapa penelitian, menyebutkan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh SBY adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Demokratis

Penelitian yang dilakukan oleh (Hasan Supriadi : 2018) dari berbagai sumber menyebutkan jika SBY merupakan sosok yang demokratis.³⁷ Pemimpin yang demokratis ialah pemimpin yang dapat terbuka terhadap berbagai kritik serta dapat menerima masukan rakyatnya, sosok demokratis ini lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan pribadi.

Hal tersebut terlihat pada saat kepemimpinan yang SBY jalani, ia berusaha mendengar berbagai pendapat dan menganalisa pendapat-pendapat tersebut untuk kemudian mengambil keputusan yang tepat. Ini dibuktikan dengan keberhasilan SBY dalam mengakhiri konflik di Aceh dan Poso.³⁸ Ia sukses mengakhiri konflik negara dengan kelompok-kelompok yang pro kemerdekaan. Selain itu, ia juga memberikan otonomi kepada daerah-daerah tersebut sebagai jalan tengah atau solusi atas konflik. Dengan demikian dapat disebutkan jika SBY memang merupakan sosok yang demokratis.

2. Kepemimpinan Otentik

Kepemimpinan otentik adalah pemimpin yang dapat mengaktualisasikan dirinya dengan kesadaran diri, mampu mencapai tujuan suatu negara di atas tujuan pribadi serta dapat mengkomunikasikan apa yang dirasakan dengan tata cara yang tepat berdasarkan hatinya. Gaya kepemimpinan otentik atau Authentic Leadership ini pun diperlihatkan oleh SBY selama masa jabatannya, menurut (Syugiarto & Nasir : 2022) kebiasaan presiden SBY itu sadar akan dirinya sendiri terutama dalam hal berpikir dan melakukan sebuah tindakan, SBY juga memperlihatkan wawasannya yang luas, harapan dan memiliki optimisme yang tinggi, serta sadar terhadap nilai-nilai

³⁵ Abdul Hakim & Guswildan Giovani, 2012, Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945 - 2009), Jurnal Ekonomika-Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Vol. 03 No.2, Hlm. 172

³⁶ Hasan Supriadi, Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia, Jurnal Agregasi, (2018), 139-148.

³⁷ Ibid.

³⁸ Tsarina Maharani, Demokrat: SBY Lebih Tepat Dijuluki 'Bapak Demokrasi, diakses dari CNN Indonesia : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220418133645-32-786087/demokrat-sby-lebih-tepat-dijuluki-bapak-demokrasi> pada tanggal 30 April 2023 pukul 14.12 WIB.

moral yang ada pada dirinya dan orang lain.³⁹

3. Kepemimpinan Karismatik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Karisma adalah atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu.⁴⁰ Karisma merupakan suatu sikap atau keadaan dalam diri seseorang yang memiliki kemampuan dalam memimpin sehingga mendapatkan pemujaan, rasa segan, atau rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Di dalam sosok SBY, ia terlihat memiliki pembawaan yang besar terhadap lingkungannya terlebih dengan latar belakangnya sebagai sosok yang terlihat formal dan tegas. Terlihat dalam 10 tahun masa kepemimpinannya, SBY mampu memberikan arahan serta pengambilan keputusan dalam kondisi apapun.

Kepribadian SBY sebagai sosok yang kharismatik ini, menumbuhkan daya tarik yang terlahir dalam dirinya sendiri. Tak heran apabila ia terpilih kembali dalam pemilu yang diadakan pada tahun 2009 dengan wakilnya, yaitu Boediono. Gaya karismatik SBY dapat dilihat dari penyampaian ia dalam berpidato, sopan santun dalam bercakap, serta memiliki wibawa tersendiri sehingga tercipta rasa kagum dari masyarakat Indonesia. Pemilihan kata-kata yang diucapkan oleh SBY pun menggunakan bahasa-bahasa formal. Gaya kepemimpinan karismatik sangat menonjol dalam diri SBY.

4. Kepemimpinan Militeristik

Kepemimpinan militeristik adalah pemimpin yang senang dengan formalitas serta menuntut kepada kedisiplinan yang tinggi dari bawahan untuk mencapai tujuan.⁴¹ Dalam riwayat pendidikan yang dijalani SBY, beliau memiliki latar pendidikan yang sangat baik. Walau beliau terlahir di sebuah kota kecil di Jawa Timur, SBY mampu melanjutkan pendidikannya hingga masuk kedalam dunia militer. Bahkan setelah ia lulus dalam Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) beliau melanjutkan studinya di American Language, Airbone and Ranger Course, dan Course Infantry Officer Advanced Course.⁴²

Melalui latar belakang beliau yang merupakan sosok perwira TNI selama 27 tahun dengan beberapa prestasi serta meraih pangkat seorang Jenderal TNI, maka terciptalah sebuah karakter dengan sifat keras, leadership, tegas, serta militeristik yang ada dalam diri beliau. Dalam kepemimpinannya, SBY kerap terlihat memarahi serta menindak menterinya di depan umum. SBY juga selalu menerapkan sikap disiplin dan tegas terhadap para pejabat yang bersikap di luar aturannya. Sehingga, gaya militeristik ini sangat melekat dalam kepemimpinan presiden SBY, ia sangat menjunjung tinggi norma-norma militer dan menjadi sebuah teladan yang dapat diambil dalam kepemimpinannya.

5. Kepemimpinan Responsif

SBY adalah sosok pemimpin yang mampu menghadapi sebuah krisis dan permasalahan negara dengan secara realtime, tidak terperangkap dalam masalah, serta dapat mencari solusi. Melalui beberapa permasalahan, SBY mampu membuat sebuah krisis menjadi sebuah peluang, ia selalu merespon berbagai macam korespondensi dan menerima pendapat, masukan, serta kritik yang ditujukan padanya.

Pada desember 2004, SBY dengan cepat merespon situasi darurat dan bencana tsunami yang terjadi di Banda Aceh, beliau memberikan operasi tanggap darurat dan kebijakan open door yang menyebabkan berbagai bantuan medis, pangan, dan lainnya dari dunia internasional. Dalam krisis ini pun, SBY melakukan sebuah peluang perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan perundingan serta merespon beberapa pendapat yang diinginkan oleh GAM. Tak jarang SBY juga menerima berbagai macam pendapat untuk setelahnya ia kaji lebih lanjut agar menghasilkan solusi terbaik. Walaupun SBY terkesan lambat dalam melakukan tindakan, hal itu ia lakukan untuk mencari

³⁹ Syugiarto dan Nasir Mangngasing, *Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia*, CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, (2022), Vol 2.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁴¹ Alumni Gadjah Mada, *5 Tipe Pemimpin dan Cara Bersikap Kepadanya*, (2016), di akses dari: <https://alumni.ugm.ac.id/2016/03/28/5-tipe-pemimpin-dan-cara-bersikap-kepadanya/#:~:text=Tipe%20Militeristik,dan%20menyukai%20upacara%20simbolis> , pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 12.35 WIB.

⁴² Nadia Khoirun Nisa', *Mengenal Gaya Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono*.

hasil terbaik melalui pemikirannya agar tidak mengambil tindakan yang salah.

Dalam beberapa penelitian tersebut, SBY merupakan sosok yang memiliki karakteristik serta kepemimpinan yang sangat berbeda dari pemimpin sebelumnya. Melalui gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh beliau, tak heran jika rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kembali kepada SBY melalui pemilu 2009. Walau demikian, popularitas SBY terus melemah karena berbagai permasalahan negara internal, seperti tindak korupsi yang tidak dapat ditangani lebih tegas.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terjadi berbagai macam perubahan baik itu dari struktur ketatanegaraannya maupun perkembangan di tiap sektor dalam negeri. Diawali dengan perubahan cara pemilihan calon presiden pada tahun 2004 yang awalnya terdapat suatu kekuasaan partai politik maka dibuatlah undang-undang mengenai cara pemilihan presiden yang baru terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem yang akan digunakan saat pemilu adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Terkait dengan sistem pemilu yang baru dan ada harapan kejayaan Indonesia kembali terwujud, hal ini membuat masyarakat Indonesia memilih SBY kembali di periode kedua dengan tujuan untuk membangun demokrasi yang terkonsolidasi.

Pada periode pertama SBY menjabat sebagai presiden terdapat berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan untuk memperbaharui segala sektor mulai dari politik yang dibentuk suatu kabinet Indonesia bersatu dan kebebasan pers yang mulai didengar, di sektor ekonomi terdapat program 100 hari untuk meringankan perekonomian warga, lalu ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi implementasi dari kampanye selama pemilihan presiden. Di sektor pendidikan, mulai ditetapkan program wajib belajar selama 12 tahun, adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Untuk aspek lingkungan, SBY mengembangkan program menanam seribu pohon dan mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan sampah dan limbah.

Dan jika dibandingkan dengan periode kedua SBY memimpin perkembangannya juga pesat dimulai dari terjadinya hubungan internasional yang cukup pesat dengan menggunakan jargon *thousand friends zero enemy* dan menjalin hubungan bilateral dengan negara ASEAN serta *New Asian-African Strategic Partnership (NAASP)*. Dibalik usaha SBY untuk menjalin hubungan bilateral dengan negara lain, beliau juga menangani permasalahan ekonomi dan memberantas korupsi.

Jika dilihat dari perkembangannya tiap sektor mengalami kemajuan yang berbeda-beda, khususnya yang terlihat sangat tajam adalah sektor perekonomian. Karena di masa kepemimpinan SBY ini sangat menitikberatkan fokusnya terhadap sektor perekonomian, yang berhasil menekan kasus krisis perekonomian khususnya di tahun 2008-2009.

Selain data yang telah dikumpulkan, terdapat beberapa teori mengenai berbagai gaya kepemimpinan. Mulai dari kepemimpinan demokratis yang di mana seorang pemimpin harus terbuka kepada semua masukan dan kritik dari rakyat. Lalu ada kepemimpinan otentik yang berisikan pemimpin bisa memperlihatkan dirinya bahwa ia memiliki kesadaran untuk mencapai segala tujuan negara dengan berkomunikasi melalui hati. Selain itu, ada kepemimpinan karismatik ialah pemimpin yang memiliki sikap pemujaan dan rasa kagum dari masyarakatnya. Lalu, ada kepemimpinan militeristik yang fokus terhadap formalitas untuk terwujudnya kedisiplinan yang tinggi demi mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir ada kepemimpinan responsif yang memuat tentang pemimpin dapat menyelesaikan segala permasalahan krisis secara langsung dan menghasilkan suatu solusi yang tidak merugikan serta mendengar segala pendapat dan juga kritik agar terwujudnya solusi yang baik. Dari teori yang sudah dijelaskan SBY sendiri mengimplementasikan semua cara kepemimpinan selama ia menjabat sebagai presiden di dua periode ini. Hal tersebut, yang membuat masyarakat memberikan harapan yang besar agar terjadinya suatu pembaruan yang besar di masa kepemimpinan SBY.

Referensi

- Bagas F, Melkisedek, Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabupaten Simeulue: PT. Maraga Borneo Tarigas, 2019.
- Maeswara G, Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009.

- Estyningtias (Lajnah Siyasiyah DPP MHTI). "Imperialisme AS di Balik Topeng APEC – dikutip dari pernyataan Laksamana Samuel J. Locklear III (Panglima Komando Militer AS di Kawasan Pasifik)" (2013) dalam <http://hizbuttahrir.or.id/2013/10/13/imperialisme-as-di-baliktopeng-apec/>
- Hakim, Abdul dan Guswildan Giovani. "Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945 - 2009)." *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 3 no.2 (2012): 173-177
- Jap O. "Taktik Self Presentation Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Melalui Akun Twitter." *Jurnal E-Komunikasi*, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra 1 no.1 (2014).
- Kusuma, JR. "Analisis Perbandingan PDB, Konsumsi, Investasi, dan Ekspor Neto di Indonesia Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Era Presiden Joko Widodo." *EKUITAS: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 8 no.2 (2020): 140-160
- Legowo, Prasetyo. "Dua Periode Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Presiden." *Jurnal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2021): 1-10
- Maula, Hafid Nafi. "Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Presidensial di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945." Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2018): 60-70
- Naimah, Hayatun. "Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 13 no.1 (2015): 120-140
- Pahlevi, Indra. "Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia." *Jurnal Politica* 5 no.2(2014): 120-140
- Pakazeni IF dan Nabila C. "Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia Pada Demokrasi di Era SBY dan Jokowi." *The Journalish: Social and Government*, Program Studi Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri, Palembang 1, no.3 (2020): 106
- Rahma, SR. "Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Selama Dua Periode." *Jurnal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2022): 1-7
- Salutondok Y dan Soegoto AS. "Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Kondisi Kerja, dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Dikantor Sekertariat DPRD Kota Sorong." *Jurnal EMBA*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Magister Manajemen Universitas Sam Ratulangi 3 no.3 (2015): 850
- Sulistiyani, Dwi dan Mukaromah. "Gaya Retorika Kepala Negara Ri: Analisis Komparatif Susilo Bambang Yudhoyono (Sby) Dan Joko Widodo". *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 no. 1 (2018)
- Sunarno. "Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Wacana Hukum* 9 no.2 (2011): 76-90
- Supriadi, Hasan. "Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia". *Jurnal Agregasi* (2018): 139-148.
- Syugiarto dan Nasir Mangngasing. "Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia". *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2 (2022)
- Widiatmaja, Aji dan Albab U. "Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah dinamika Lingkungan Strategis Regional." *Jurnal Politica*, Program Studi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia 10 no.1 (2019): 80-91
- Yudhistira E. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 23 no.2 (2020): 149
- Alumni Gadjah Mada, 5 Tipe Pemimpin dan Cara Bersikap KepadaNya, (2016), di akses dari [https://www.kbbi.web.id/karisma](https://alumni.ugm.ac.id/2016/03/28/5-tipe-pemimpin-dan-cara-bersikap-kepadanya/#:~:text=Tipe%20Militeristik,dan%20menyukai%20upacara%20Dupacara%20simbolis,pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 12.35 WIB.</p><p>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan, diakses dari <a href=) pada tanggal 30 April 2023 pukul 14.48 WIB.
- Kumparan, Membandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi, diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/membandingkan-pertumbuhan-ekonomi-era-sby-dan-jokowi-1549415979213066574/full>, pada hari Kamis, 26 April 2023, pukul 13:05 WIB

- Kompas.com, SBY Akan Tanam 1.000 Pohon, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2008/11/11/14444326/SBY.Akan.Tanam.1.000.Pohon>, pada hari Sabtu, 29 April 2023
- Laksa, "Era Kepresidenan SBY Periode Pertama (2004-2009)", diakses dari <https://www.abdinegaraneews.web.id/2019/11/era-kepresidenan-sby-periode-pertama.html> pada hari Sabtu, 29 April 2023
- Laska, "Era Kepresidenan SBY Periode Kedua (2009-2014)", diakses dari <https://www.abdinegaraneews.web.id/2019/11/era-kepresidenan-sby-periode-pertama.html> pada hari Senin, 23 April 2023, pukul 20:56 WIB
- Syah, Saprudin Padlil, Kebijakan Pendidikan Strategis Era SBY", diakses dari <https://www.kompasiana.com/padlilisyah/54f39506745513a32b6c7a5b/kebijakan-pendidikan-strategis-era-sby> pada hari Sabtu, 29 April 2023
- Tsarina Maharani, Demokrat: SBY Lebih Tepat Dijuluki 'Bapak Demokrasi, diakses dari CNN Indonesia : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220418133645-32-786087/demokrat-sby-lebih-tepat-dijuluki-bapak-demokrasi> pada tanggal 30 April 2023 pukul 14.12 WIB.